



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NUR MUFLICH JUNIYANTO  
NIK : 2171031006770015  
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Kerja : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
Sub Unit Kerja : BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR  
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2024  
Tanggal Kirim : 18 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : NUR MUFLICH JUNIYANTO
- Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK : 187071

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 27.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 41.657.260

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 618.657.260

**III. HUTANG** Rp. 500.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 118.657.260

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.